BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data-data yang telah disajikan, penelitian ini menemukan bahwa terbentuknya Gerakan "Save Sagea" tidak dapat dijelaskan hanya dengan satu faktor tunggal, seperti sebagai respons spontan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas industri pengolahan nikel di Halmahera. Kemunculan gerakan tersebut merupakan hasil dari kombinasi antara *material capabilities*, *ideas*, dan *institutions.* Ketiga aspek tersebut saling memperkuat sehingga membentuk suatu kelompok lokal yang mencoba melawan tatanan hegemoni yang melegitimasi pengembangan industri nikel atas nama transisi energi global tanpa memperhatikan masyarakat sebagai bagian dari ruang hidup di sekitar kawasan industri.

Pada aspek *material capabilities*, ketika kehadiran PT IWIP yang didukung penuh oleh Pemerintah Indonesia dan menjalankan operasi industri pengolahan nikel berskala masif yang mengancam sungai, lahan, dan kawasan karst yang selama ini menopang kehidupan komunitas, masyarakat Sagea membaca kondisi ini bukan sekadar sebagai kerugian ekologis melainkan sebagai ancaman terhadap keberlangsungan hidup mereka secara kolektif. Meskipun terdapat keuntungan-keuntungan ekonomi yang ditawarkan dari adanya industri pengolahan nikel ini, mereka menemukan bahwa tidak semua lapisan masyarakat dapat merasakannya dan keuntungan tersebut juga tidak sebanding dengan dampak jangka panjang yang akan mereka hadapi beberapa tahun mendatang, bahkan

setelah industri selesai. Hal inilah yang menjadi dasar terbentuknya kesadaran kolektif dari masyarakat Desa Sagea.

Kesadaran kolektif yang mulai terbentuk tersebut kemudian semakin menguat pada aspek *ideas*. Narasi transisi energi global yang digunakan untuk melegitimasi kehadiran PT IWIP justru menjadi salah satu pendorong terkuat bagi berkembangnya kesadaran kolektif masyarakat Desa Sagea. Ketika mereka menemukan kontradiksi antara klaim keberlanjutan dan realitas produksi, seperti 80% produksi nikel masih diorientasikan untuk stainless steel, penggunaan PLTU batubara untuk semua proses produksi, limbah slag yang ditimbunkan ke pesisir, hal ini tidak lagi dapat mereka abaikan. Dari kontradiksi inilah, legitimasi industri yang selama ini dibangun melalui narasi transisi energi global runtuh di mata masyarakat dan memicu berkembangnya citra kolektif tandingan dengan *framing* "wilayah pengorbanan" yang tidak hanya menyatukan masyarakat Desa Sagea tetapi memberi gerakan ini relevansi yang melampaui batas lokal.

Pada aspek *institutions*, pengalaman berhadapan dengan institusi negara yang tidak berpihak yang mereka rasakan dan alami melalui absennya FPIC semakin mengkonsolidasikan masyarakat Desa Sagea sebagai gerakan yang terorganisir, gerakan “Savea Sagea”. Pada titik ini muncul kesadaran, yang sekaligus menjadikan gerakan ini lebih terorganisir dan meluas dibanding hanya sekedar gerakan perlawanan tentatif yaitu ketika jalur formal melalui pemerintah terbukti tidak berfungsi, gerakan ini memperluas arena perlawanannya dari media sosial ke level internasional secara konsisten untuk memperjuangkan hak-hak

masyarakat melawan tatanan hegemoni industri pengolahan nikel yang membawa narasi transisi energi global.

4.2. Saran

Penelitian ini berfokus kepada gerakan masyarakat sebagai subjek aktif dalam dinamika industri pengolahan nikel. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada sumber data primer yang hanya bersumber dari satu narasumber sebagai perwakilan gerakan "Save Sagea". Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas jangkauan pengumpulan data primer dengan melibatkan lebih banyak aktor yang relevan termasuk masyarakat lokal yang terdampak langsung, perwakilan pemerintah daerah, maupun pihak perusahaan, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang dinamika gerakan ini. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mempertimbangkan penggunaan kerangka teori yang berbeda untuk memperkaya analisis tentang gerakan sosial lokal di Indonesia dalam konteks transisi energi global, mengingat kompleksitas isu yang tidak hanya menyangkut dimensi lingkungan tetapi juga hak masyarakat lokal, relasi kekuasaan sumber daya alam, dan keadilan iklim.